

FESTIVAL JOGOKALI: Resistensi Terhadap Penggusuran dan Gerakan Sosial-Kebudayaan Masyarakat Urban

Oleh : Andri A^{*)}

Abstrak

This study discusses the symbolic resistance of urban poor who defend settlements in flood plains of *Strenkali Wonokromo* Surabaya from the threat of eviction by using the media arts and culture as a form of social movements. Forced eviction of public housing by the state is a common phenomenon that occurs in big cities in Indonesia at present. However, the threat of evictions was not only by the state only but also with public opinion on their residential slums.

Based on these phenomena, this study will conduct thick description of the process of using ethnographic methods approach. Through ethnographic methods, this study is to describe the social structure and culture of a society with emphasis on the exploration of the nature of a particular social phenomenon rather than testing hypotheses. The focus of ethnographic attempts to draw broad conclusions from a small thing, but that is composed of solid facts.

The results of this study showed that the resistance to forced evictions is no solution by the flood plain of participatory times of *strenkali Wonokromo* through symbolic resistance to the use of media arts and culture in the form of a festival. Arts and cultural practices of the festival named *Jogokali*, a position statement of self-expression, opinion, and thoughts of urban poor who live in flood plains of *strenkali* who often do not experience oppression in hearing their aspirations. In addition, through the practice of the arts and culture, urban poor provide counterpart concepts can be proposed and formulated by the communities themselves to the country and

^{*)} Dosen pada Progam Studi Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

want to introduce to the general public about the concept and its role for the wider community in conserving river.

Kata Kunci: Community of Strenkali, eviction, Practice of artistic-culture, Hegemony, and Social movement

Pengantar

... is to fix two major superstructural 'level': the one that can be called 'civil society', this is the ensemble of organisms commonly called 'private', and the 'political society' or 'the state'. These two levels correspond on the one hand to the function of 'hegemony' which the dominant group exercises throughout society and the other hand to that of 'direct domination' or command exercised through the 'state and juridical government'. (Antonio Gramsci)

Pengusuran paksa terhadap hunian masyarakat oleh negara merupakan fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia saat sekarang.¹ Secara umum, praktik pengusuran paksa oleh negara, memiliki kecenderungan dengan cara-cara, *pertama*, diawali dengan penggunaan hukum (berupa peraturan-peraturan daerah) sebagai legitimasi untuk melakukan pengusiran. *Kedua*, dengan dasar ini negara mengeluarkan surat formal atau pun statemen yang menyuruh penduduk meninggalkan lokasi. *Ketiga*, dalam praktik pengusuran, aparat gabungan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan TNI) digunakan untuk melakukan pengusiran paksa yang seringkali terjadi praktik kekerasan.²

¹ Tidak ada informasi angka yang pasti tentang berapa jumlah penduduk yang mengalami pengusuran di kota-kota Indonesia. Akan tetapi berita-berita tentang pengusuran kaki lima dan penduduk kawasan kumuh adalah berita yang cukup umum menghiasi surat kabar di Indonesia. Sebuah laporan dari lembaga internasional yang khusus menangani persoalan pengusuran dan perumahan perkotaan, <http://www.cohre.org>, menempatkan Indonesia masuk dalam daftar 3 besar negara yang mendapat penghargaan sebagai "juara penggusur rumah". Pemilihan ini didasarkan pada berbagai pelanggaran hak-hak perumahan yang dilakukan terus menerus terencana dan tidak bisa dibenarkan secara hukum. Indonesia juga dianggap tidak berhasil menerapkan aturan HAM nasional dan internasional yang berlaku.

² Laporan khusus Harian Kompas tentang "Gusur, Gusur, Gusur.. sikap aparat yang memperlakukan warga, seperti layaknya seorang musuh dalam berperang." <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0310/11/Fokus/615075.htm>

Bentuk penolakan dari masyarakat yang mendapat ancaman penggusuran oleh negara ini, termanifestasikan dengan berbagai macam cara, mulai dari dengar pendapat (*hearing*) dengan Pemerintah –eksekutif dan legislatif— untuk bernegosiasi secara damai hingga melancarkan tekanan dalam bentuk pengarahannya massa atau sering juga disebut dengan demonstrasi. Tindakan-tindakan tersebut ditujukan kepada institusi-institusi dan lembaga-lembaga negara yang dianggap bertanggung jawab terhadap persoalan penggusuran. Ancaman penggusuran terhadap hunian masyarakat juga terjadi di Surabaya. Dalam pemberitaan media cetak lokal, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintahan Kota telah menerbitkan surat pemberitahuan lokasi-lokasi yang akan dilaksanakan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda).

Khususnya bagi masyarakat yang menghuni di sepanjang bantaran sungai di Surabaya –masyarakat yang menghuni bantaran sungai di Jagir Wonokromo yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini—, meski pihak warga mengklaim telah menghuni lama dan selalu menjalankan kewajiban dengan membayar retribusi kepada pemerintah, menjadi persoalan ketika kebijakan Pemerintah Kota dan Provinsi saat ini tidak menghendaki keberadaan masyarakat yang hidup di pinggir kali tersebut dan dengan segala cara pula perlawanan muncul dari masyarakat untuk mempertahankan lahan hunian. Masyarakat yang tinggal di perkampungan miskin selalu dalam ancaman pengusuran dan harus mampu menemukan dan merumuskan cara-cara untuk dapat bertahan.

Tekanan-tekanan lain yang dihadapi oleh warga masyarakat yang menghuni bantaran sungai adalah opini-opini yang diwacanakan oleh media massa lokal baik cetak maupun elektronik tentang keberadaan mereka yang dianggap liar, penyebab banjir jika musim hujan berlangsung, membuat sungai kotor karena limbah rumah tangga, dan tempat orang-orang dengan penyandang masalah sosial —pekerja seks komersial, pemulung, dsb— serta kesemuanya dengan argumentasi demi ketertiban dan keindahan kota.³

Dari semua cara yang pernah dilakukan masyarakat bantaran sungai Wonokromo untuk menolak penggusuran –dari diskusi dengar pendapat hingga aksi demonstrasi turun kejalan—, sangat menarik kemudian, resistensi kolektif yang di bangun untuk melawan dengan menggunakan media kesenian. Masyarakat yang tinggal disepanjang bantaran sungai (strenkali) ini menggelar

³ Pencarian berita-berita media cetak tentang kehidupan keseharian masyarakat bantaran sungai bisa di cari dengan menggunakan mesin pencari di beberapa situs internet dengan menuliskan kata kunci “banjir Surabaya, prostitusi di Surabaya, premanisme di Surabaya”.

sebuah festival Jogo (menjaga) Kali (sungai) sebagai salah satu bentuk gerakan mereka.

Kajian terhadap fenomena praktik kesenian dan kebudayaan masyarakat miskin urban dalam kaitannya dengan pergolakan sosial masyarakat belum banyak mendapatkan perhatian. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan di maksud. Tema tentang praktik kesenian dan kebudayaan sebagai pilihan gerakan sosial masyarakat, sebagai sebuah studi sosiologi mendesak untuk ditemukan pemahaman atas pemaknaan realitas sosial yang sedang terjadi, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ini., *Pertama*, selama ini masyarakat miskin kota di pandang sebagai penyandang permasalahan sosial yang terus menerus dijadikan objek. Di pandang sebagai kaum marjinal yang tidak pernah di dengar suaranya dan perlu di'tertib'kan. Dalam terminologi yang lain, miskin kota perlu untuk diberdayakan karena dijadikan objek belas kasihan. Kecenderungan ini sungguh menarik, apakah dengan menggunakan media kesenian dan kebudayaan, masyarakat miskin kota mendefinisikan dirinya untuk berbicara atas nama, atau menyeruakan, suara-suara terbungkam yang benar-benar tertindas.

Kedua, ancaman penggusuran yang akan dilakukan Pemerintah Propinsi dan Kota kepada warga masyarakat bantaran sungai/*stren kali* hingga sekarang masih belum bisa terselesaikan oleh pihak-pihak terkait, akan tetapi di sisi lain meninggalkan trauma. Ketidakpastian tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, dan terhentinya pendidikan anak-anak jika penggusuran dilakukan, maka hal ini tidak bias dibiarkan berlarut-larut. Dengan kondisi trauma tersebut akan mengimplikasikan pertanyaan lanjutan secara substansial tentang, apakah realitas yang semakin menghimpit kehidupan yang dialami masyarakat miskin kota memperluas pengorganisasian gerakan dengan pendekatan-pendekatan lain.

Studi mengenai kebudayaan dan gerakan sosial di masyarakat menjadi menarik di teliti, dikarenakan praktik kebudayaan merupakan wujud dinamis suatu kelompok sosial tertentu, maka analisa dinamika kebudayaan perlu menjelaskan kaitannya dengan bagaimana suatu kelompok sosial berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan bagaimana mereka mempersepsikan lingkungan sekitar mereka sehingga melahirkan suatu sistem makna. Sistem makna sendiri merupakan jaringan dimana individu ataupun suatu kelompok sosial memposisikan diri mereka di dalam ruang sosial dan merespon suatu perubahan sosial yang diakibatkannya.⁴

⁴ Clifford Gertz yang mengatakan demikian, "culture is a web of meaning in which human is an animal imprisoned within the webs of meaning that he has spun." (Geertz, *The Interpretation of Culture*, 1974)

Festifal Jogokali dan Makna Resistensi Simbolik

Di balik seluruh rangkaian acara yang menyusun sebuah festival, terdapat makna besar yang menyertainya. Hal ini memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Festival Jogokali, mengingat bahwa festival ini diadakan sebagai tujuannya untuk melakukan kampanye yang berbeda dari kampanye-kampanye yang pernah dilakukan. Bedanya yang lain adalah bahwa kampanye kali ini diadakan dengan mencoba memasuki sekaligus mengeksplorasi lanskap tradisi masyarakat yang dipenuhi oleh semangat-semangat kesenian baik yang memang selama ini telah terkandung dalam jiwa masyarakat bantaran sungai Surabaya.

Bersih Sungai; Acara pertama dalam rangkaian Festival Jogokali ini membawa pesan urban tersendiri. Secara umum, acara bersih sungai merupakan kegiatan yang memiliki makna cukup luas sekaligus signifikan. Semua berangkat dari esensi sungai bagi kota Surabaya. Sungai di Surabaya bukan hanya sebagai sungai semata-mata, namun lebih dari itu, sungai bagi kota Surabaya adalah lebih berarti sebuah sumber air utama bagi pengadaan air bersih. Kenyataan ini menuntut sebuah konsekuensi besar, bahwa sungai di Surabaya haruslah sebuah sungai yang bersih, dalam artian terbebas dari masalah sampah dan limbah.

Melalui acara bersih sungai inilah, warga bantaran sungai mencoba mengenalkan konsep "peran masyarakat bantaran sungai bagi kebersihan sungai Surabaya". Dengan acara ini, komunitas Jogokali berupaya untuk memunculkan sebuah fungsi penjaga sungai yang harus diakui seringkali dilupakan oleh masyarakat pada umumnya. Secara sederhana, bisa dianggap bahwa hampir tidak ada satupun masyarakat yang peduli soal kebersihan sungai. Dan di sisi inilah masyarakat bantaran sungai mengambil peran utama. Masyarakat bantaran sungai-lah yang nantinya akan menjadi corong pertama yang akan berteriak saat terjadi hal-hal yang menyebabkan tercemarnya sungai Surabaya.

Perlombaan Mancing; Kegiatan sejenis ini memang telah banyak diadakan, terutama berhubungan dengan penyaluran hobi. Namun, hal yang lebih utama dari lomba mancing ini adalah selain hobi yang dapat tersalurkan, iming-iming hadiah yang cukup menggiurkan juga menjadi salah satu motivasi para peserta sebuah lomba mancing.

Namun berbeda dengan yang telah ada sebelumnya, lomba mancing yang menjadi salah satu acara dalam rangkaian Festival Jogokali ini memiliki makna yang mengandung pesan-pesan tertentu. Bila pada umumnya sebuah lomba mancing bisa diartikan sebagai sebuah persaingan untuk mendapatkan ikan dengan bobot paling besar, maka lomba mancing Festival Jogokali ini memiliki arti yang jauh lebih besar.

Menjadi rahasia umum, sungai-sungai di Surabaya sudah banyak yang tercemar. Salah satu asumsi yang berkembang di masyarakat umum, bahwa sungai di Surabaya telah sedemikian kotornya sehingga tidak layak lagi di konsumsi, baik airnya sendiri maupun ikan-ikan di dalamnya. Dan melalui lomba mancing inilah warga bantaran sungai mencoba mendekatkan kembali masyarakat umum lainnya dengan sungai, dimana semua berhak menggunakan sungai sebagai sebuah sumber daya tanpa harus takut untuk mengkonsumsinya. Masyarakat sungai sekali lagi akan berperan sebagai penjaga sungai, dan masyarakat kota lainnya juga akan mendapatkan haknya untuk menggunakan sungai tersebut tanpa harus ragu apakah sungai dan semua isinya tersebut layak dikonsumsi atau tidak.

Mural; Kegiatan ini mungkin memang belum sedemikian akrab dengan telinga masyarakat pada umumnya. Namun, dengan melalui pembelajaran selama beberapa waktu, warga Jogokali sepakat untuk memilih acara ini sebagai salah satu bagian dari rangkaian acara dalam Festival Jogokali.

Mural yang telah dikenal bahkan sejak beberapa ratus tahun lalu ini dianggap dan disetujui oleh masyarakat sebagai salah satu media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan tentang tema besar Festival Jogokali, yaitu pentingnya menjaga kelestarian sungai dengan masyarakat bantaran sungai sebagai peran utamanya. Tidak bisa dipungkiri, mural adalah media kesenian yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh warga, bahkan tanpa keahlian khusus sekalipun. Melalui mural atau pembuatan lukisan dengan media dinding ini, masyarakat Jogokali banyak mengeluarkan 'uneg-uneg' maupun tuntutan dan harapan mereka terhadap pemerintah kota Surabaya. Tak hanya soal pemukiman saja, melalui gambar-gambar sederhana yang mereka buat di atas dinding sepanjang 800 meter itu mereka juga dengan berani menyatakan kesiapan mereka untuk berperan aktif dalam usaha pelestarian sungai. Selain itu, teriakan-teriakan tuntutan untuk menghentikan pembuangan limbah yang bisa merusak habitat sungai sendiri juga muncul dalam lukisan-lukisan warga Jogokali.

Panggung Rakyat; Acara bertajuk pesta bersama warga Jogokali melalui suguhan-suguhan acara kesenian dari para warga sendiri. Panggung rakyat ini bukanlah sekedar pesta dimana para warga berlomba menampilkan kemampuan mereka dalam ranah seni. Lebih dari itu, dalam panggung rakyat inilah para warga Jogokali mencoba mengundang sekaligus merangkul kelompok-kelompok lain untuk bergabung dan memberikan dukungan terhadap usaha warga Jogokali dalam tujuannya untuk mengangkat isu pelestarian lingkungan, terutama sungai.

Panggung rakyat yang diadakan secara sederhana ini bertujuan untuk membangun sebuah kekuatan gabungan antara warga Jogokali sendiri dengan

kelompok-kelompok lain yang memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan masyarakat bantaran sungai. Dengan adanya acara ini, diharapkan bahwa nantinya akan banyak yang tersadarkan tentang peranan masyarakat bantaran sungai dalam usaha-usaha untuk menjaga sungai dari pencemaran yang meresahkan, terlebih lagi mengingat bahwa sungai adalah sumber daya air utama di kota Surabaya.

Karnaval; Format acara pawai ini di ambil sebagai salah satu bentuk deklarasi yang menegaskan tentang keberadaan masyarakat Jogokali yang siap untuk menjadi lini terdepan dalam permasalahan pelestarian sungai Surabaya. Dalam makna lain, dengan dimulainya Festival Jogokali ini, maka titik awal sebuah solidaritas warga pemukiman bantaran sungai yang tergabung dalam Komunitas Jogokali juga telah terbangun. Tentu saja, terbentuknya komunitas ini juga menandai adanya peranan utama masyarakat sungai dalam upaya untuk melestarikan sungai sebagai salah satu sumberdaya air utama kota Surabaya.

Larung; Dalam bahasa lokal, larung diartikan sebagai salah satu bentuk *selamatan* dengan tujuan untuk membuang hal-hal negatif yang bisa terjadi dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan kota yang semakin kompleks, keberadaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Surabaya dianggap telah merusak citra kota indah yang berusaha dibangun oleh pemerintah kota. Sementara di sisi lain, anggapan itu sama sekali tidak memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat pinggiran sungai juga memiliki peranan penting dalam upaya pelestarian sungai. Artinya, bahwa selama ini ancaman penggusuran pemukiman pinggir sungai dengan alasan keindahan kota hampir sama sekali muncul tanpa adanya solusi.

Hal-hal inilah yang disikapi warga bantaran sungai sebagai pengaruh negatif yang harus di buang atau di tolak. Dengan adanya larung ini, masyarakat bantaran sungai mencoba mengatakan pada masyarakat kota luas bahwa keberadaan mereka bukanlah semata-mata sebuah perusak pemandangan. Sebagai simbolisasi, warga membuat sebuah tumpeng yang kemudian dihanyutkan atau di-*larung* di sungai Surabaya. Disinilah makna besar *selamatan* dalam budaya Jawa itu dimunculkan.

Kemandirian masyarakat yang ditunjukkan dalam pembuatan festival ini, merupakan sesuatu hal yang sangat maju di tengah kepongungan komersialisasi sebuah produk kesenian dan kebudayaan. Sekurang-kurangnya masyarakat bantaran kali tidak tergantung pada monopoli kapital Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang memperlakukan kebudayaan dimengerti semata-mata sebagai barang unik dan antik yang bisa diperjualbelikan layaknya komoditi lainnya. Jadi, bukan kebudayaan yang berjiwa, melainkan komoditi kultural untuk di jual.

Membuat festival dengan modal menggali dan mengorganisir ingatan kultural yang dihidupi masyarakat, berarti juga terangkatnya kesenian rakyat

yang bersifat demokratis karena tercipta dan tumbuh secara alamiah sesuai dengan kehendak dan kemampuan rakyat, tidak dipaksakan ada hanya karena ia menjadi komoditi penting sebagai ornamen wisata yang menghasilkan devisa. Sifat demokratis yang melekat dalam kesenian dan kebudayaan tersebut meluas bobotnya ketika bisa mengajak dan memungkinkan semua orang berdialog bersama. Sifat dialog ini pula mengantarkan pada bentuk kebudayaan baru yang bukan sekedar angan-angan dan imajinasi tanpa sebab-akibat dari penciptanya. Dalam ruang-ruang yang demokratis inilah gagasan-gagasan pembebasan bisa lahir dan berkembang.

Resistensi Masyarakat Strenkali; Membaca Antagonisme Baru

Konsep sentral dalam pemikiran Gramsci adalah hegemoni, yang kerap dirumuskan sebagai kepemimpinan moral dan intelektual suatu kelompok atas kelompok-kelompok lain. Pengaruh modal dan intelektual ini yang pada gilirannya membangkitkan dukungan (*consent*) dan persetujuan pada kelompok yang hegemonik. Persetujuan (*consent*) adalah satu sisi dari dua sisi kekuasaan. Kekuasaan adalah persetujuan yang didukung dan diperkuat oleh koersi (*coercion*) atau kekerasan.⁵

Terciptanya ketaatan moral, intelektual dan afektif karena dikehendaki oleh kekuatan struktur ekonomi dan politik. Dalam konteks peradaban modern, kebudayaan dominan dengan demikian merupakan hasil penaklukan kapitalisme terhadap aktivitas kebudayaan manusia. Bahkan jika dibandingkan dengan aparat modernisme yang lain –militer, birokrasi, dan borjuasi lokal— kapitalisme tetap menjadi ujung tombaknya. Gramsci melihat secara kritis bahwa kekuatan struktur ekonomi dan politik itu akan semakin meminggirkan ekspresi yang tidak berada di dalam jaringan penaklukan.

Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia tentunya akan mengikuti derap laju pembangunan kota modern, dimana kehidupan perkotaan yang kompleks semakin membutuhkan banyak ruang. Stigmatisasi pembangunan perkotaan memposisikan kawasan dan lingkungan permukiman kumuh adalah penyakit kota. Kawasan dan lingkungan permukiman kumuh di anggap sebagai bagian wilayah kota yang sangat tidak produktif, kotor, tidak memiliki potensi, tidak efisien, dan mengganggu estetika serta keindahan. Pendekatan konvensional yang paling populer adalah menggusur permukiman kumuh dan kemudian di ganti oleh kegiatan perkotaan lainnya yang di anggap

⁵ Antonio Gramsci, *Selections From Prison Notebooks* (London: Lawrence and Wishart, 1986)

lebih bermartabat, cara seperti ini yang sering disebut pula sebagai peremajaan kota.

Bentuk kampanye program-program kota produktif, kota bersih, kota berpotensi, birokrasi kota yang efisien, dan peningkatan estetika kota tentunya oleh warga kota secara umum akan diberikan persetujuan (konsensus) baik secara aktif maupun pasif. Penting untuk di catat, fenomena masyarakat urban adalah masyarakat yang heterogen dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Di satu sisi, bagi masyarakat yang memiliki tingkatan tinggi dengan kepemilikan dan penguasaan keterampilan ataupun modal, dapat memiliki dan memainkan peran dalam sistem yang akan dikembangkan kota. Di sisi lain, bagi mereka yang tidak mempunyai sesuatu untuk ditawarkan, kemungkinan besar hanyalah sekedar bertahan untuk meneruskan hidup. Di sisi yang pertama relatif terdapat para pemilik modal, wiraswasta, profesional, dan sebagainya. Di sisi yang kedua, para buruh industri, individu-individu yang tidak mempunyai harapan mendapat pekerjaan dan mempelajari keterampilan baru, pada berjalannya waktu akan hancur eksistensinya.

Sepintas, pengakuan terhadap mekanisme konsensus terdengar elagan dan patriotis, karena di peroleh melalui persetujuan majemuk, namun dalam apabila dikaitkan dengan penggunaan paksaan oleh satu kelas atas yang lainnya, persetujuan dalam proses yang hegemonik tentu tidak akan pernah memberikan jawaban yang memuaskan bagi korban penggusuran hunian di bantaran kali. Sebab, hegemoni dibakukan melalui banyak cara dimana pranata masyarakat sipil, realitas sosialnya dibentuk atas realitas sosial yang sudah mapan. Bagi Gramsci, hegemoni adalah bentuk kontrol dan kekuasaan yang sangat penting. Dengan demikian kekuasaan hegemonik lebih merupakan kekuasaan melalui "persetujuan", yang mencakup beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial-politik yang ada. Dalam gagasan Gramsci, hegemoni menitik-beratkan pada superfisialitas persetujuan di dalam sistem kapitalis dimana persetujuan itu mencakup bentuk komitmen aktif maupun pasif. Persetujuan sebagaimana dikonseptualisasi oleh Gramsci, adalah ungkapan intelektual dan arah modal melalui mana perasaan massa secara tetap terikat dengan ideologi dan kepemimpinan politik negara sebagai ungkapan keyakinan dan aspirasinya.

Sebagai sebuah fenomena umum, problem pertanahan dan permukiman mengemuka di kota-kota di Indonesia. Kota Surabaya menjadi kota yang menarik berkaitan dengan problem pertanahan dan permukiman ini. Surabaya merupakan salah satu kota tua di Indonesia dan kota terbesar sejak abad ke-19. Tidak mengherankan apabila kota ini menjadi tujuan utama para pendatang dari desa-desa di sekitar Surabaya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi telah menjadikan masalah pemukiman menjadi problem yang krusial dari waktu ke waktu.

Bagi masyarakat yang hidup dan menghuni di bantaran kali pada awalnya ialah keinginan untuk mendapat akses ekonomi yang disediakan kota besar seperti di Surabaya, ketidakmampuan untuk membeli harga tanah yang melambung tinggi di kota maka tidak ada pilihan lain untuk menempati tanah-tanah kosong untuk mendekati dengan pekerjaan yang digeluti. Namun kemudian yang harus dihadapi tidak hanya pada kebijakan Pemerintahan kota tentang ancaman penggusuran, juga pencitraan negatif publik kota secara umum. Peran media –cetak dan elektronik— yang sesekali mengangkat pentingnya penataan ruang kota, sedikit banyak akan mempengaruhi opini kepada publik luas. Tuduhan-tuduhan sebagai bangunan liar, penyebab banjir jika musim hujan berlangsung, membuat sungai kotor karena limbah rumah tangga, dan tempat orang-orang dengan penyandang masalah sosial —pekerja seks komersial, pemulung, dsb— serta dengan argumentasi demi ketertiban dan keindahan kota.

Mempertahankan hunian yang akan diperjuangkan masyarakat sepanjang bantaran kali juga akan berhadapan dengan logika umum bahwa sebagai individu/kelompok miskin maka harus siap dengan dijadikan objek tanpa harus bersuara sendiri oleh masyarakat umum atas ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan serta ancaman bagi eksistensi kota yang sejahterah. Dengan kalimat lain dapat dijelaskan faktor-faktor ketidakberdayaan mereka, maka perlu diberdayakan dan diberi persetujuan oleh masyarakat umum untuk memegang otoritas kota bertindak.

Tidak teringkar bahwa kawasan dan lingkungan permukiman kumuh perkotaan berkembang di luar kendali kebijakan dan sistem penataan ruang kawasan perkotaan. Dalam banyak kasus masyarakat pemukim kawasan ini berhadapan dengan persoalan laten terkait dengan ketidak-pastian status hukum penguasaan dan penggunaan lahan, menempati lahan yang dalam perspektif lingkungan dan pengelolaan kawasan tidak direkomendasikan sebagai daerah hunian sampai lahan publik. Tidak ayal jika tanah-tanah in-absensia, bantaran sungai, penyangga jalan kereta api, pemakaman umum dan kawasan sekitar pembuangan akhir sampah perkotaan dikerumuni gubug-gubug, rumah semi permanen dan kemudian juga rumah permanen. Lingkungan permukiman kumuh tersebut miskin fasilitas umum dan dihuni para pekerja kota dalam berbagai sektor dan jenis pekerjaan.

Sudut pandang yang lain seperti pada pemikiran Laclau dan Mouffe, membaca resistensi yang dilakukan warga strenkali adalah bentuk “gerakan sosial/kemasyarakatan baru”.⁶ Kepentingan terhadap pertumbuhan kota di masa

⁶ Konsep ‘gerakan kemasyarakatan baru’ sebagai subyek revolusioner masa kini, merupakan pemberontakan terhadap ajaran Marx dan para pemikir neo-Marxist, yang masih melihat kaum buruh (proletariat) sebagai subyek revolusioner yang utama.

kapitalisme mutakhir dan mendapat persetujuan umum dengan sukarela dari masyarakat kota yang membutuhkan tata tertib dan keindahan demi konsumsi modernisasi, tidak menyebabkan berakhirnya ideologi, seperti kata Daniel Bell, atau menciptakan 'manusia satu dimensi', seperti yang dikhawatirkan Herbert Marcuse, tapi sebaliknya, melahirkan berbagai bentuk perjuangan baru yang menunjukkan perlawanan terhadap bentuk-bentuk subordinasi baru, yang muncul dari jantung masyarakat baru ini. Aksi-aksi menentang bentuk kekerasan secara paksa dengan penggugusuran kelompok marjinal kota, memicu gerakan-gerakan baru untuk menentang ketidakadilan sosial.

Festival dan Perubahan Sosial; Mencipta Kebudayaan Alternatif

Analisa Gramsci atas suatu momen politis tidak berhenti pada variabel-variabel politis semata, sebagaimana dilakukan dalam kajian ilmu politik, namun mencakup juga momen-momen dan proses social yang merupakan kondisi-kondisi kemungkinan dari momen politis. Momen social ini juga mencakup ranah budaya yang selama itu oleh para pemikir Marxist (dan juga pemikir ilmu politik pada umumnya) diabaikan dan di pandang sebagai sesuatu yang kontingen dan marginal dibandingkan dengan ranah ekonomis dan politis. Dalam konteks ini, dapatlah dikatakan bahwa yang 'politik' (*the political*) diperluas untuk mencakup yang 'budaya' (*the cultural*) juga. Yang budaya, yang sehari-hari di anggap memiliki nilai politis dan arena itu punya nilai strategis.

Dari pemikiran Gramsci inilah yang melahirkan, antara lain, studi budaya dan studi-studi lain yang menghargai keseharian. Dalam penghargaan akan keseharian dan yang marginal ini, Gramsci memberi perhatian pada kemungkinan politis dari kelompok-kelompok 'subaltern' (kelompok yang menjadi subordinat dari kelompok pemegang sarana produksi).

Sebuah gagasan "Festival Kesenian dan Kebudayaan" sebagai bentuk perjuangan anti penggusuran masyarakat miskin urban adalah fenomena menarik di tengah kebudayaan nasional dalam kepungan kebudayaan global yang cenderung untuk seragam. Penggunaan media kesenian dan kebudayaan, masyarakat miskin urban mendefinisikan dirinya untuk berbicara atas nama, atau menyerukan, suara-suara terbungkam yang benar-benar tertindas.

Dalam sebuah pengorganisasian masyarakat terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. Artinya, dalam memilih dan menentukan metode atau

Konsep gerakan kemasyarakatan baru, menurut Laclau dan Mouffe, merangkum berbagai gerakan atau perjuangan (*struggle*) yang tidak berbasis kelas dan bukan gerakan buruh, seperti gerakan kaum urban, gerakan lingkungan, gerakan anti-otoriterisme, gerakan anti-institusi, gerakan feminis, gerakan anti-rasisme, gerakan etnis, gerakan regional, dan gerakan perdamaian (Laclau and Mouffe, 2000)

strategi apa yang sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayah tertentu juga harus berlandaskan pada beberapa argumentasi yang paling memungkinkan untuk dapat di terima dan dijalankan masyarakat. Dalam beberapa perbincangan pada bagian-bagian sebelumnya, proses diskusi masyarakat juga dihadiri oleh beberapa individu-individu dan kelompok-kelompok yang bersimpati dan berempati untuk mendukung perjuangan masyarakat bantaran kali.

Dipilihnya praktik kesenian dan kebudayaan dalam bentuk "Festival" bukan tanpa alasan. *Pertama*, problem diantara warga tentang informasi kepastian waktu penggusuran yang simpang-siur yang memberi dampak lemahnya soliditas warga yang ditunjukkan dengan minimnya keterlibatan secara bersama dalam intensitas pendiskusian masalah penggusuran. *Kedua*, dari beberapa kelompok warga dengan bersama dengan kelompok lembaga swadaya masyarakat yang telah mendampingi yang sudah meyakini bahwa penggusuran akan terjadi telah melakukan kegiatan semacam tabungan bersama dalam bentuk arisan untuk meningkatkan soliditas dalam berjuang ternyata belum maksimal. *Ketiga*, bahwa yang akan dihadapi oleh warga tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat umum dengan stigma negatif.

Kemudian dimunculkan gagasan dalam bentuk berkesenian, dengan argumentasi bahwa kesenian adalah sebuah unsur dimana masyarakat umum sekalipun dapat dengan mudah menerimanya. Kesenian dan kebudayaan bisa menjadi alat yang berpihak pada kaum-kaum terpinggirkan atau berlandaskan keberpihakan pada masyarakat terpinggirkan, yang dalam hal ini adalah masyarakat bantaran sungai.

Berjalannya proses diskusi masyarakat, tercetuslah usulan tentang sebuah deklarasi –bukan sebagai sebuah deklarasi biasa— dengan semangat untuk mempublikasikan kepada masyarakat umum bahwa masyarakat miskin urban yang hidup di bantaran kali mempunyai peran bagi kepentingan kehidupan masyarakat luas dengan menjaga sungai. Kelompok masyarakat miskin urban ini mendeklarasikan dirinya sebagai Komunitas Jogokali. Kemudian dalam mengemas deklarasi tersebut, komunitas ini mencoba untuk menarik perhatian masyarakat lain dengan sebuah acara kesenian dan kebudayaan bertajuk "Festival Jogokali".⁷

⁷ Dari pengamatan dan keterlibatan peneliti di aktivitas masyarakat, pada awalnya masyarakat belum mengenal istilah festival ini, namun individu-individu dan kelompok-kelompok yang tergabung dengan warga setempat terlebih dahulu mencoba dengan tekun mengenalkannya. Dalam kesehariannya para warga belum benar-benar memiliki kegiatan yang bersifat kesenian yang dilakukan secara rutin. Kalaupun ada, bentuk-bentuk kesenian itu mereka lakukan dengan alasan ekonomi seperti "mengamen" di jalan dan keliling kampung-kampung tetangga.

Titik utama yang dikedepankan dalam pembuatan “Festival Jogokali” ini adalah menggali ingatan kearifan kultural warga sebelum beranjak ke kota besar untuk mencari pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dengan membangkitkan ingatan tentang kultur tersebut –yang selama ini tersimpan dalam ingatan yang tertutupi oleh aktivitas sehari-hari— diharapkan nantinya akan muncul keinginan untuk melakukannya kembali di daerah baru yang saat ini di huni. Kearifan kultural disini merujuk pada peran masyarakat secara kolektif untuk lingkungan sosial yang harmonis, menjaga tidak terjadi kerusakan-kerusakan ekologis, dan berusaha mandiri secara kolektif dalam membangun kesejahteraan bersama.

Keyakinan terhadap pentingnya kearifan kultural dan warga akan mampu melakukan sebuah deklarasi dengan kesenian, mengingat kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat bantaran sungai berasal dari desa-desa sekitar Surabaya, dimana sebelumnya mereka telah mengenal ritus-ritus kebudayaan. Memang terdapat beberapa kesulitan dalam penggalian ingatan kolektif saat mencoba memberikan tawaran ini pada masyarakat. Namun, terdapat sebuah keyakinan di mana sebenarnya tiap manusia memiliki hasrat berkesenian yang tinggi. Hanya masalah meluangkan waktu untuk melakukannya. Sebenarnya sudah banyak aktivitas kesenian yang dilakukan masyarakat bantaran kali ini, namun tidak diperhatikan dan hanya terlintas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sebagai contoh konkrit, beberapa warga berprofesi sebagai pengamen dalam bentuknya sebagai “pemain ludruk, pemain jatilan, dan beberapa kesenian tradisonal yang eksis di masyarakat.”⁸

Tawaran dalam bentuk sebuah festival ini lebih di titik beratkan pada usaha masyarakat untuk membangun kekuatan di posisinya yang lemah berkaitan dengan penggusuran. Dengan landasan inilah masyarakat akan membentuk sebuah komunitas yang akan dideklarasikan dengan media sebuah festival. Itulah kenapa bentuk festival yang akhirnya di pilih, karena melalui sebuah festival akan lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk mengapresiasi jiwa seninya.

Dengan semangat awal untuk mempersatukan seluruh warga dalam menghadapi ancaman penggusuran, deklarasi Komunitas Jogokali dengan menggunakan media Festival ini secara normatif bisa dikatakan berhasil berdasar pada antusias semua warga untuk berpartisipasi dan bekerja bersama untuk keberhasilan bersama. Sebelum adanya bentuk deklarasi ini, hambatan

⁸ Jatilan adalah salah satu jenis tarian rakyat yang bila ditelusur latar belakang sejarahnya termasuk tarian yang paling tua di Jawa. Tari yang selalu dilengkapi dengan property berupa kuda kepang ini lazimnya dipertunjukkan sampai klimaksnya, yaitu keadaan tidak sadar diri pada salah seorang penarinya.

masyarakat untuk bekerja bersama terbatas dengan status-status sosial yang notabene sangat heterogen. Sebagai contoh, masyarakat di Kampung Baru terbagi dalam dua wilayah, Timur dan Barat. Masyarakat Kampung Baru di bagian Timur kebanyakan berasal dari *luberan* kampung lama sekitar, yang mencari pemukiman baru dan pada akhirnya di tahun 1998 melakukan pematokan tanah di bantaran sungai Wonokromo. Kehidupan mereka-pun bisa dikatakan lebih teratur. Salah satunya bisa dilihat dari struktur bangunan rumah di situ yang lebih permanen. Pekerjaan yang digeluti pun kebanyakan lebih mapan. Sementara, Kampung Baru di bagian Barat, di huni masyarakat yang berasal dari kaum urban yang mencoba mencari penghasilan di kota, lewat beberapa pekerjaan yang bisa dikatakan oleh masyarakat umum sebagai pekerjaan rendah seperti pemulung hingga pekerja seks komersial. Struktur bangunan yang digunakan realtif muda untuk di bongkar-pasang –tidak memakai tembok batu bata dan menggunakan pondasi penyangga semacam besi-besi bekas atupun kayu—. Perbedaan inilah yang menyisakan konflik, saling tuding, yang membuat jarak perbedaan status sosial semakin lebar dan menghambat proses komunikasi untuk bekerja sama. Hambatan untuk soliditas bisa terpecahkan dengan adanya festival dan pemahaman baru bahwa ancaman penggusuran yang dihadapi akan berlaku bagi siapa saja yang menghuni di sepanjang bantaran kali dan tidak akan melihat pengaruh status sosial.

Bagi keberlanjutan interaksi sosial⁹ Komunitas Jogokali sendiri, deklarasi ini adalah sebuah kesepakatan-kesepakatan baru. Kesepakatan-kesepakatan tersebut terdiri dari beberapa hal, diantaranya adalah kesepakatan untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai, penataan mandiri pada pemukiman yang di huni, dan kemudian akan turut menjaga sungai dengan cara saling mengingatkan sesama warga masyarakat.

Peran Masyarakat Miskin Urban Di Ruang Publik Kota

Surabaya, dengan dibangunnya pusat-pusat bisnis dan industri membawa dampak –selain mengakibatkan permintaan tanah semakin tinggi—peluang pekerjaan-pekerjaan baru. Di salah satu sisi, ini berarti pekerjaan bergaji besar bagi para profesional, para manajer, dan bahkan bagi staf administrasi dan pekerja industri, yang bisa digolongkan sebagai kelas menengah. Di sisi lain,

⁹ Hal yang utama dalam proses interaksi sosial, pertama adanya persetujuan kontrak sosial antar individu atau kelompok. *Kedua*, dalam proses interaksi sosial terjadi proses komunikasi yang setara. Yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.

permintaan terhadap tenaga kerja bergaji rendah juga semakin meningkat guna memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah dan "para pekerja berpenghasilan tinggi" akan jasa dan barang.

Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia di adalah tuntutan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial dan kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan dunia global. Namun demikian dalam prosesnya, seringkali menyisakan trauma-trauma khususnya bagi masyarakat miskin urban. Kecenderungan yang terjadi, masyarakat miskin lebih cenderung di jauhi ketimbang di wadahi aspirasinya. Mereka yang tinggal di perkampungan miskin selalu dalam ancaman penggusuran dan harus mampu menemukan cara-cara untuk bertahan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, dimana setiap kabupaten dan kota di Indonesia berhak mengatur dirinya sendiri, pasti mentikberatkan pada wacana pentingnya keterlibatan aktif –partisipasi— semua masyarakat. Dalam praktiknya, persoalan-persoalan kota terkait peran warga, jarang sekali melibatkan masyarakat miskin.

Menyangkut peran serta semua warga dalam pengembangan kota, warga strenkali Surabaya mengaku tidak sama sekali menyangkut peran serta warga. Kelurahan dan Kecamatan sebagai perwakilan Pemerintah kota hampir tidak pernah mengatakan bahwa ada mekanisme peran serta warga dalam memutuskan sesuatu, hubungan dengan pemerintahan kelurahan dan kecamatan selama ini sebatas surat peringatan. Bahkan untuk ditemui seringkali menghindar atau tidak ada di tempat.

Warga merasa kesulitan dan tak punya akses untuk bisa berperan serta dalam mengurus kota, terlebih bila dihadapkan kepada masalah konflik ruang. Warga bantaran kali mengaku tidak tahu saluran resmi untuk mengadukan dan menyelesaikan masalah konflik ruang. Dalam pemahaman warga, bahwa selama ini konflik selalu diselesaikan lewat jalur pengadilan yang berlangsung lama, mahal, dan sulit diakses warga, khususnya yang miskin. Ketika ada pembahasan tentang hunian 'liar' di siaran televisi lokal, hampir tidak pernah menampilkan warga untuk membicarakan sediri kepentingannya. Warga menilai pemerintah hanya melibatkan kelompok tertentu (semacam konsultan) dalam pengambilan keputusan menyangkut kota.

Kesenjangan sudut pandang antara pemerintah kota dan warganya bukan hanya terjadi dalam hal peran serta warga. Dalam melihat persoalan informalitas dan menyelesaikan kemiskinan kota, warga punya pendapat sendiri. Jika selama ini pemerintah kota cenderung memerangi informalitas dan memosisikan kelompok miskin sebagai beban kota, tidak demikian dengan warga. Protes-protes dan harapan-harapan warga yang diserukan lewat kesenian di festival Jogokali menyatakan bahwa Kota Surabaya bukan hanya milik kelompok kaya

yang beraktivitas di sektor formal. Masyarakat yang miskin dan yang bekerja di sektor informal macam pedagang kaki lima, buruh kontrak, serta pasar tradisional pun punya hak atas kota. Di mata warga, kelompok miskin dan pekerja di sektor informal juga punya andil atas berkembangnya kota. Selain menyediakan pekerja murah dan barang-barang murah, masyarakat miskin kota dan sektor informal kota macam PKL telah mampu menjawab masalah pengangguran.

Tidak seperti pandangan dan yang dibayangkan pemerintah kota, warga strenkali ternyata cukup terbuka terhadap berbagai alternatif solusi bagi permukiman mereka. Terbukti, di saat pemerintah kota mengandalkan satu jawaban saja untuk masalah permukiman miskin dalam wujud rumah susun, warga sendiri justru melihat, rumah susun bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi permukiman miskin. Masih ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah, memberikan kelonggaran waktu tertentu untuk warga keluar sendiri dari permukimannya sekarang dengan kesadaran sendiri untuk menabung dan mengumpulkan uang untuk membeli perumahan murah di kota di luar skema rumah susun. Dari diskusi rutin bersama para pendamping, sebenarnya warga tidak menginginkan untuk anak-anak keturunannya kelak menghuni bantaran kali.

Pemerintah kota juga bisa menjalankan program perbaikan kampung dengan melibatkan warga miskin penghuninya, menerapkan sistem *land sharing* pada lahan negara dan lahan milik privat, memanfaatkan lahan tidur, atau dengan menjalankan program transmigrasi. Namun pemerintah kota lebih tertarik dengan pilihan menggusur permukiman-permukiman miskin yang di nilai pemerintah sebagai liar. Artinya, penggusuran yang selama ini dilakukan pemerintah kota terhadap banyak permukiman miskin, PKL, dan pasar tradisional sebenarnya tidak punya basis legitimasi.

Kesimpulan

Dari temuan data dan analisis yang penulis lakukan; yang menjadi latar belakang masyarakat kampung melakukan resistensi simbolik dengan membuat sebuah Festival; *Pertama*, dengan semakin menguatnya proses Pemerintah Kota dalam melaksanakan penggusuran, terjadi demoralisasi (keterputusasaan) dalam perjuangan untuk mempertahankan permukiman oleh masyarakat strenkali di Surabaya. Hal ini terbukti dari proses perjuangan dari tahun ke tahun dengan menggunakan konsep tanding yang diberikan masyarakat dalam penyelesaian masalah permukiman, oleh DPRD dan Pemerintah Kota hanya sebatas di dengar tanpa adanya kemajuan (progresivitas) dalam penyelesaian secara bersama dalam keputusan penggusuran. *Kedua*, lemahnya masyarakat strenkali dalam membangun opini publik lewat media massa atas ide-ide dan

rumusan-rumusan tawaran penyelesaian atas permukiman, mengingat dalam pemberitaan media massa hanya menitikberatkan pada proses perjuangan seperti demonstrasi massa dengan tidak mengulas secara lebih dalam.

Ketiga, keberhasilan yang masih bisa dipertahankan adalah semangat kolektif masyarakat untuk tetap bersatu dan bersama dalam mempertahankan permukiman serta tetap bisa mempertahankan komunikasi sosial dengan kelompok masyarakat lain (agamawan, beberapa organisasi massa, para mahasiswa, dan individu yang peduli atas nasib mereka) dengan membuat Paguyuban. *Keempat*, sebagai salah satu bentuk resistensi –atas ancaman penggusuran permukiman oleh negara— yang di bangun dari hubungan setara antara kolektif masyarakat dengan subjek-subjek aktif dalam sebuah paguyuban, Festival Jogokali menjadi momen sosial (*counter culture*) dan mempunyai nilai strategis politis (*counter hegemony*). Letak keberhasilan dalam merumuskan bentuk resistensi di lihat dari kemampuan merumuskan perbedaan wacana dari keberagaman konstruksi setiap subjektivitas posisi individu.

Kelima, beberapa capaian tahapan gerakan sosial dalam membangun (*engage*) gerakan kultur tanding sekaligus sebagai hegemoni tanding dalam penelitian ini antara lain; (1) 'solidaritas dan mobilisasi-mikro', dari pertemuan-pertemuan dalam aktivitas paguyuban berhasil mengidentifikasi sumber-sumber material (*material resources*) dan modal kultural (*cultural capital*) yang di pakai untuk melakukan perlawanan. Hubungan dialektik dari solidaritas dan mobilisasi-mikro menyinggung; (a) produksi partisipasi baru, (b) mengaktifkan kembali ingatan lampau atas partisipasi komunal, (c) mempertahankan keberlanjutan partisipasi yang telah ada, (d) kritik dan evaluasi atas partisipasi saat ini. Berikutnya adalah (2) 'komitmen dan identitas kolektif'; capaian bersama dalam paguyuban mampu memperkuat karakter komunitas. Hubungan dialektik dari komitmen dan identitas kolektif; (a) kesadaran sebagai ideologi, (b) moral atas identitas personal, (c) unsur emosional pendukung motivasi.

Sebagai bentuk pagelaran tontonan dengan mengusung nilai-nilai perlawanan, sebenarnya Festival Jogokali juga dimaksudkan untuk menyajikan tontonan yang murah untuk rakyat. Disebut sebagai tontonan yang murah meriah karena untuk memainkannya tidak perlu menghadirkan peralatan (*properties*) kebutuhan yang banyak sebagaimana bentuk festival umumnya. Dihilnya bentuk-bentuk perlawanan simbolik dalam rangkaian kegiatan keseharian dari bersih sungai hingga perlombaan mancing, warga bantaran sungai mencoba mengenalkan konsep "peran masyarakat bantaran sungai bagi kebersihan sungai Surabaya". Dengan acara ini, komunitas Jogokali berupaya untuk memunculkan sebuah fungsi penjaga sungai yang harus diakui seringkali dilupakan oleh masyarakat pada umumnya. Masyarakat bantaran sungai-lah yang nantinya akan menjadi corong pertama yang akan berteriak saat terjadi hal-hal yang menyebabkan tercemarnya sungai Surabaya. Dalam bentuk

simbolik yang lain dengan membuat Panggung Rakyat hingga Larung Sungai, semua bentuk atraksi kesenian yang ditampilkan dalam panggung tersebut juga merupakan kehidupan keseharian masyarakat sebagai pengamen jalanan, dengan penampilan yang dimainkan tanpa mengikuti pakem seni pementasan yang sudah ada dan sudah mapan.

Ekspresi kebangkitan masyarakat miskin urban dalam mengenalkan identitas komunal dan konsep-konsep mereka terhadap penyelesaian permasalahan permukiman kumuh di gali dan di organisir sebagai gerakan sosial lewat penampilan kultural dan identitas keseharian yang menjadi pola hidup masyarakat bantaran sungai/strenkali. Lewat aksi-aksi teatrikal yang mengangkat ikatan-ikatan kultural tersebut mereka menampilkan gugatan secara simbolik dengan berbagai kritik membangun dan tawaran-tawaran alternatif solusi, baik kepada aparaturnegara maupun kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan masalah penggusuran serta kelompok-kelompok berpengaruh lainnya yang di undang sebagai bentuk solidaritas. Meski aksi kesenian dan kebudayaan itu ditujukan kepada aparat negara, namun karya-karya festival tersebut ditampilkan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum.

Praktik kesenian dan kebudayaan sebagai bentuk gerakan sosial masyarakat miskin urban terhadap ancaman penggusuran juga ditujukan sebagai konsep tanding yang bisa diusulkan dan dirumuskan oleh masyarakat sendiri kepada negara. Konsep tanding yang secara simbolik dipertunjukkan dalam rangkaian acara festival mencoba membaca antagonisme baru, apakah negara akan memfasilitasi semua golongan dalam masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pengembangan kota mengingat bahwa kecenderungan pemerintah kota –negara— yang memposisikan kawasan dan lingkungan permukiman kumuh adalah penyakit kota, tidak produktif, kotor, tidak memiliki potensi, tidak efisien, dan mengganggu estetika serta keindahan maka layak untuk dilakukan penggusuran. Masyarakat strenkali Wonokromo sebagai bagian dari komunitas masyarakat sipil yang memperjuangkan hak dalam kebutuhan hunian, –dalam prespektif gerakan sosial Laclau dan Mouffe— merupakan bentuk-bentuk perlawanan terhadap bentuk-bentuk penindasan baru yang muncul pada masyarakat kapitalisme kekinian.

Sebagai implikasi teoritik, peneliti memandang beberapa hal perlu dicermati dari prespektif Gramsci dan Laclau-Mouffe tentang resistensi dan gerakan sosial seperti pada fenomena Masyarakat Strenkali Surabaya. Ada *discontinuity* dalam memahami; *Pertama*, Antonio Gramsci (awal abad 20) dalam menghadapi sistem kapitalisme dan pada saat yang sama berhadapan dengan diktator Mussolini, analisa yang digunakan dalam membahas penindasan dan ketertindasan masih berbasis perjuangan klas. Kontribusi Gramsci adalah

menyandingkan perjuangan petani (di Italia Selatan) dengan perjuangan buruh (di Italia Utara). Dalam konteks hubungan alinasi antara buruh dan tani, gerakan buruh masih tetap menempati posisi pemimpin. Hal ini tidak terlepas pencegahan atas petani terkooptasi oleh borjuis kapital setelah mendapat pembagian tanah. Sedangkan Ernesto Laclau and Chantal Mouffe (akhir abad 20 dan awal abad 21) tidak lagi memakai analisa bahwa penindasan berbasis klas, tetapi menempatkan analisa pada setiap masyarakat sebagai agen sosial adalah titik temu bagi keberagaman dari relasi sosial yang tidak sebatas pada hubungan sosial produksi tertentu tetapi juga termasuk relasi-relasi sosial keseharian seperti relasi dengan lingkungan, gender dan sexualitas, dsb. Relasi-relasi sosial saat ini mempengaruhi dan menentukan personalitas posisi individu (*local subject position*), yang masing-masing didalamnya memunculkan berbagai macam konstruksi sesuai dengan perkembangan wacana yang dapat mengkonstruksi posisi tersebut.

Kedua, meski Gramsci menolak pemisahan pekerjaan otak dan pekerjaan otot dengan menghargai kesetaraan keduanya dengan mengembangkan pembedaan konsep 'intelektual tradisonal' (pemikir mengabdikan pada kepentingan borjuasi) dan 'intelektual organik' (pemikir yang dihasilkan oleh setiap kelas secara 'alamiah'). Penyelesaian dalam memecah antagonisme dalam sistem kapitalisme, Gramsci masih menempatkan posisi klas khususnya buruh untuk memimpin klas lainnya. Laclau dan Mouffe memandang saat sekarang tidak terjadi penindasan yang ekstrim dan masif, seringkali setiap 'tuntutan' berbeda dan bersifat partikular dan terkadang tidak ada ketersambungan antara (sebagai misal) tuntutan kenaikan upah buruh dan perbaikan lingkungan. Yang menyatukan adalah 'kesetaraan' (*chain of equivalence*) dalam perjuangan dalam melawan sistem yang melakukan penindasan.

Continuity terjadi antara Gramsci dan Laclau-Mouffe, ketajaman dalam membongkar dan menganalisa praktik-pratik rejim represif serta memberikan emansipasi perjuangan demokratik baru yang selalu mengisi ruang-ruang kosong dalam gerakan sosial. Keberpijikan *continuity* tersebut pada konsep Hegemoni yang berhasil dikembangkan Gramsci. Gerak hegemoni; *Pertama* gerak dari atas ketika rejim represif mengkonstruksi kesadaran palsu masyarakat dan membatasi masyarakat dari kesadaran atas penindasan; *Kedua*, gerak dari bawah di ranah kontestasi masyarakat sipil terhadap represifitas rejim.

Dalam praksisnya, *pertama*, resistensi dalam bentuknya baik yang simbolik maupun yang secara langsung ditunjukkan kepada negara lewat serangkaian aksi massa, belum tentu mengubah cara pandang negara terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban. Penguasa negara akan selalu mencari cara untuk melakukan legitimasi kepentingan. Bentuk-bentuk resistensi yang pernah dilakukan oleh masyarakat seringkali tidak menyurutkan langkah pemerintah kota untuk tetap melaksanakan penggusuran di wilayah-wilayah lain

di sepanjang bantaran sungai Surabaya. *Kedua*, membangun gerakan sosial masyarakat sipil melawan kebijakan negara yang merugikan, dalam merumuskan bentuk-bentuk penindasan baru terhadap masyarakat miskin diperlukan besaran waktu yang cukup lama untuk melakukan pengorganisasian, jejaring, dan pemahaman bersama masyarakat sipil korban lain. Sedangkan dalam perjuangan masyarakat bantaran sungai ini sebatas membicarakan kebutuhan mendesak agar tidak terjadi penggusuran.

Maka dibutuhkan wujud-wujud dari hasil yang diperjuangkan yang bersifat pragmatis sebagai reaksi langsung terhadap kebijakan negara atas sistem sosial, ekonomi, dan politik yang sedang berjalan. Dalam konteks resistensi masyarakat, bentuk-bentuk pragmatis tersebut seperti adanya kontrak-kontrak sosial dan politis yang berhasil menekan pemerintah untuk mendengarkan dan menerima usulan-usulan masyarakat serta pemerintah tidak akan menggunakan cara-cara kekerasan dan ancaman psikis kepada masyarakat. Dalam konteks membangun gerakan sosial, bentuk-bentuk pragmatis tersebut harus ditunjukkan dengan adanya dukungan dari masyarakat sipil lain –komunitas PKL, buruh kontrak, nelayan kota, dsb— yang menghadapi ancaman yang sama atas kebijakan negara dan membangun dukungan kekuatan politis atas posisi masyarakat miskin urban.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict., 1983, *Imagined Communities: Reflections on the origins and spread of nationalism*, London: Verso.
- Geertz, Clifford., 1983, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- , 1992, *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 1999, *After the Fact*. Yogyakarta: LKiS.
- Gramsci, Antonio, 1986, *Selections From Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart.
- , 1995, *The Southern Question. Translated and Introduction by Pasquale Verdicchio*. West Lafayette, Indiana: Bordighera Inc.
- Hall, Stuart., 1992, Who Needs Identity, dalam Stuart Hall dan Du Gay (editor), *Questions of Cultural Identity*, London: Sage.
- Ismail, Taufik, 1995, *Prahara Budaya: Kilas Balik*

- Koentjaraningrat., 2005, *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Ketiga.
- Laclau, Ernesto., 2000, Constructing Universality, dalam Judith Butler, Ernesto Laclau and Slavoj Žižek, *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left*. London: Verso.
- Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe., 2001, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics*. London: Verso, (Second Edition).
- Lifschitz, Mikhail., 2004, *The Philosophy of Art of Karl Marx*. (terj. Widjaja). Yogyakarta: Alinea.
- Melluci, Alberto., 1989, *Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society*. London: Hutchinson Radius.
- Merriam Webster Dictionary, 2004, Springfield: MA 01102
- Moore-Gilbert, B.J. 1997, *Post Colonial Theory*. London-New York: Verso.
- Muchsin, Bashori, 2006, *Dampak Implementasi Kebijakan Penertiban Bantaran Stren Kali Surabaya dan Wonokromo*. Universitas Brawijaya: Malang.
- Oxford Advanced Learner's Dictionary, 1995, Oxford University Press.
- Said, Edward, W., 1995, *Kebudayaan dan Kekuasaan, Membongkar Mitos Hegemoni Barat*. (terj.). Meuleman, Hendrik. Bandung: Mizan.
- Salamini, Leonardo, 2004, *The Sociology of Political Praxis: an Introduction to Gramsci's Theory*. (terj. Widjaja). Yogyakarta: Alinea.
- Soenyono, 2007, Disertasi. *Gerakan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan*. Universitas Airlangga: Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Spradley, James. P., 1997, *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sutrisno, Mudji, 1995, *Filsafat Sastra dan Budaya*. Jakarta: Obor.
- Tarrow, Sidney, 1998, *Power Movement*. New York: Cambridge University.
- Wheatly, Paul, 1983, *Nagara and Commandery: Origins of the Southeast Asian Urban Traditions*. The University of Chicago: Department of Geography.



